KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA UKPBJ

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2024

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

UKPBJ

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

BIRO UMUM

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Bagian Layanan Pengadaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum selama tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga dilakukan sebagai bentuk kepatuhan Biro Umum terhadap amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja juga berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja UKPBJ Tahun 2024 memberikan gambaran hasil pengukuran pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Biro Umum Tahun 2024 dan merujuk Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Luar Negeri.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan pula perencanaan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum, di masa mendatang lebih meningkat melalui evaluasi atas kendala dan hambatan yang dihadapi.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Bagian Layanan Pengadaan/
Kepala UKPBJ

Istabah Abdilah Muhamad
NIP. 19831107 200901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAGIAN I **PENDAHULUAN**	5
BAGIAN II **RANGKUMAN EKSEKUTIF**	8
BAGIAN III **DASHBOARD REALISASI PENGADAAN**	10
BAGIAN IV **PENCAPAIAN TARGET KINERJA**	12
BAGIAN V **ANALISA DAN REKOMENDASI**	13
5.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	13
5.2 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	14
5.3 Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	15
5.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	16
BAGIAN VI **CAPAIAN LAINNYA**	17
PENUTUP	18

BAGIAN I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2024 yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Penyusunan LKj Tahun 2024 telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, LKj Bagian Layanan Pengadaan dalam memaparkan analisis capaian kinerja, beserta dengan kendala dan solusi yang dihadapi selama tahun 2024 telah mengacu pada 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process*, dan *Learning and Growth*.

Bagian Layanan Pengadaan memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa Kesekjenan dan seluruh Satker Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ terus berupaya meningkatkan manajemen kinerja dengan berpedoman pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan kaidah yang berlaku.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Hasil Pencapaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai jalur komunikasi atau pelaporan pencapaian kinerja yang dapat digunakan selama satu tahun baik dalam bentuk cetak, sistem informasi online, maupun dalam bentuk presentasi kepada pemangku kepentingan

D. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Bagian Layanan Pengadaan merupakan salah satu Bagian pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Permenlu No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri pada pasal 133, Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Layanan Pengadaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Permenlu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri No 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri pada pasal 134 bahwa untuk menjalankan amanat ketentuan perundang-undangan, **Layanan Pengadaan Secara Elektronik** (LPSE) dibawah naungan Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ Kementerian Luar Negeri.

Lebih lanjut dalam Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga, besaran organisasi UKPBJ ditetapkan berdasarkan kriteria yang merupakan penilaian terhadap komponen yang berpengaruh pada beban kerja UKPBJ yang dihitung berdasarkan rata-rata dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Hasil penghitungan ukuran organisasi UKPBJ yang telah dilakukan oleh Biro Umum Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2024, ukuran UKPBJ Kementerian Luar Negeri memiliki nilai 78,75 atau dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi pratama (Kepala Biro).

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bagian Layanan Pengadaan Biro Umum terdiri atas, yaitu:



Arianto Surogo
Kepala Biro Umum

Wawan Setiawan
JFPK Madya

Intahab Abdillah Muhamad
Kepala Bagian Layanan Pengadaan

Kepala JKPB

Kepala Sub Bagian Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan

Kepala Sub Bagian Pengadaan Jasa Konstruksi

Pengadaan ICM Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Perlengkapan Manajemen Barang/Jasa Pengadaan Sistem Informasi

Rudi Setiawan
JF Umum
PPK UKPBJ

Rivaldi Hermawan
JFPBJ Pertama
PP UKPBJ

Hafiz Fadhil Tabahi
JFPBJ Pertama

Dewi Novi Anjani
JFPBJ Pertama

Dewi Anggraeni
JFPBJ Pertama

M Jadi Irawan
JFPID Pertama

Dewi Tetia Permatasari
JFPK Pertama

BAGIAN II
RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pada Tahun 2024, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 2 (dua) sasaran kinerja yang dijabarkan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut usulan proses pemilihan penyedia dari Satker
2. Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
3. Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa
4. Tingkat kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

UKPBJ Kementerian Luar Negeri di Tahun Anggaran 2024 telah menyelesaikan Pengadaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Metode Pengadaan	Total Pagu	Total Harga Perkiraan Sendiri	Total Nilai Pemenang
1	Tender	Rp84,135,252,977.74	Rp76,267,630,136.22	Rp67,759,850,684.00
2	Seleksi	-	-	-
3	Tender Cepat	Rp17,156,743,920.00	Rp15,970,625,378.00	Rp14,016,974,969.00
4	Penunjukan Langsung	Rp69,343,977,831.74	Rp62,833,842,821.22	Rp54,500,661,606.00
5	Pengadaan Dikecualikan	Rp112,017,594,234.74	Rp101,634,944,924.02	Rp92,244,313,986.80
Total		**Rp282,653,568,964.22**	**Rp256,707,043,259.46**	**Rp228,521,801,245.80**
Selisih Pagu/Nilai Pemenang (Penghematan)		**Rp54,131,767,718.42**		
Selisih HPS/Nilai Pemenang (Penghematan)		**Rp28,185,242,013.66**		

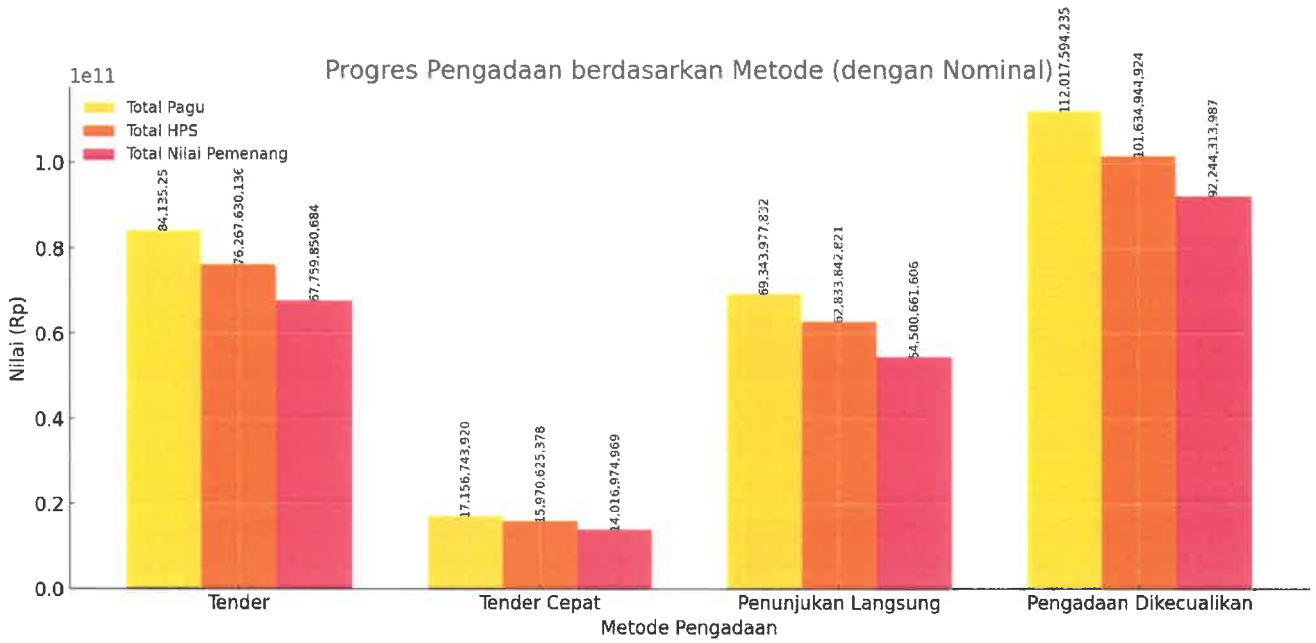
Berdasarkan data diatas, penghematan dalam proses pemilihan penyedia sepanjang tahun 2024 oleh pokja pemilihan sebesar Rp54,131,767,718.42 atau Rp28,185,242,013.66 berdasarkan selisih antara HPS/Pagu dengan Nilai Pemenang.

Per 31 Desember 2024 Kementerian Luar Negeri nilai transaksi *e-purchasing* melalui Katalog Versi 5.0 mencapai Rp18,174,620,940 dengan jumlah transaksi sebanyak 14 paket pengadaan.

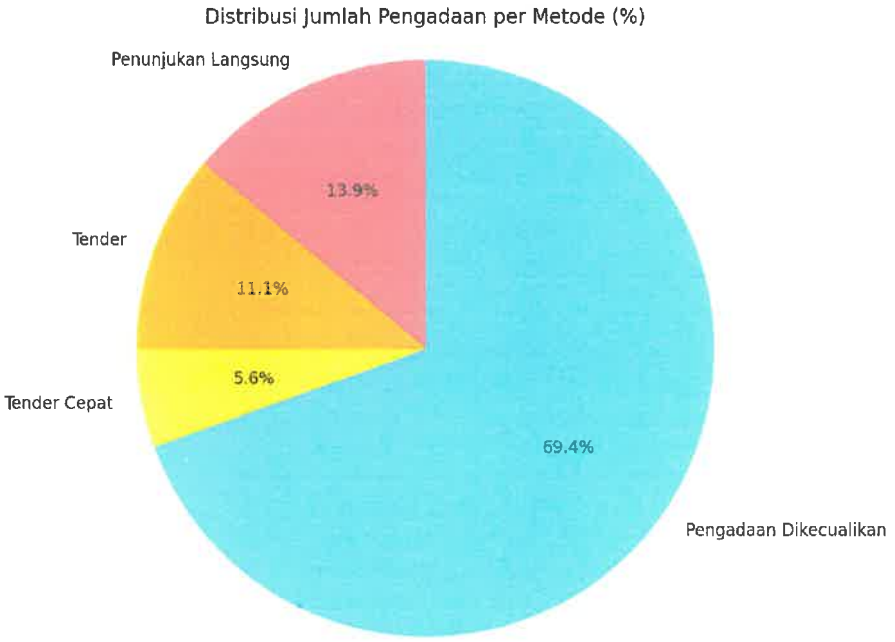
BAGIAN III
DASHBOARD REALISASI PENGADAAN

Berikut adalah data Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ yaitu Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan yang dikecualikan dan melalui PP/PPK yaitu Pengadaan Langsung dan E-Purchasing telah diselesaikan berdasarkan usulan dari Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan **jumlah paket dan pagu anggaran**.

Tabel 3.1 Grafik Pengadaan berdasarkan Paket



3.2 Grafik Berdasarkan Metode Pengadaan



Pada tahun 2024 Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa berdasarkan metode pengadaan paling banyak dicapai menggunakan metode:

- Pengadaan Dikecualikan: 40.4%
- Tender: 29.7%
- Penunjukan Langsung: 23.8%
- Tender Cepat: 6.1%

BAGIAN IV
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja UKPBJ dibagi menjadi 4 (empat) area pengukuran yaitu aspek **waktu, biaya, kualitas,** dan **tingkat layanan**. Layanan pengadaan tahun 2024 telah dilaksanakan dengan cukup baik dan optimal. Namun demikian, pengelolaan kinerja akan terus ditingkatkan dan dievaluasi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan efektifitas layanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun-tahun anggaran yang akan datang.

Area Pengukuran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Target 2024	Realisasi 2024	Pencapaian
Waktu	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	Jumlah Paket	100%	100%	Baik
		Pagu Anggaran	100%	100%	Baik
Biaya	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	9%	25,44%	Baik
Kualitas	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	-	100%	100%	Baik
Tingkat Layanan	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	Internal dan Eksternal	93.87 %	91.35%	Baik

BAGIAN V
ANALISA DAN REKOMENDASI

5.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

<table>
<tr><td>Objektif Kegiatan</td><td>Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa</td></tr>
<tr><td>Indeks Kinerja Utama (IKU)</td><td>Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Hasil Penilaian</td><td><table><tr><td></td><td>Jumlah Paket</td></tr><tr><td>Target</td><td>100%</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>98,44%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Justifikasi dan Rekomendasi</td><td>Berdasarkan data monitoring UKPBJ Kementerian Luar Negeri terdapat 54 Paket pengadaan metode tender/seleksi/tender cepat/pengadaan dikecualikan yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan (berdasarkan surat permohonan permintaan pokja pemilihan) namun dalam realisasinya dijelaskan sebagai berikut:
36 paket diselesaikan,
18 paket batal (pokja pemilihan merekomendasikan pelaksanaan pengadaannya melalui e-purchasing)
sehingga didapatkan persentase % Penyelesaian Pemilihan Penyedia PBJ (jumlah PBJ selesai/jumlah pbj diproses) sebesar 100%. Kinerja ketepatan waktu dari Satuan Kerja dapat dilakukan dengan sempurna dengan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan optimalisasi mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul, sehingga usulan paket Pengadaan Barang/Jasa tetap dapat selesai tepat waktu (memenuhi target).</td></tr>
</table>

5.2 Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
Hasil Penilaian	

	HPS
Target	9%
Realisasi	25,44%

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	HPS	Nilai Kontrak	Selisih/Efisiensi HPS	% HPS
1	Barang	-	-	-	-	-
2	Jasa Konsultasi	-	-	-	-	-
3	Jasa Lainnya	28	Rp190,687,224,060.24	Rp118,917,957,733.80	Rp 71.769.266.326,44	**37,64%**
4	Pekerjaan Konstruksi	8	Rp126,316,823,957.44	Rp109,603,843,512.00	Rp 16.712.980.445,44	**13,23%**
TOTAL		**36**	**Rp 317.004.048.017,68**	**Rp 228.521.801.245,80**	**Rp 88.482.246.771,88**	**25,44%**

Justifikasi dan Rekomendasi	Berdasarkan tabel diatas terdapat 36 paket Pengadaan dengan rincian 36 paket diselesaika. Efisiensi yang dicapai berdasarkan nilai HPS sebesar 25,44%, persentase ini melebihi dari rencana target efisiensi HPS yaitu sebesar 9%.

5.3 Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa

<table>
<tr><td>Objektif Kegiatan</td><td>Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa</td></tr>
<tr><td>Indeks Kinerja Utama (IKU)</td><td>Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa</td></tr>
<tr><td>Hasil Penilaian</td><td><table><tr><td></td><td>Jumlah Paket</td></tr><tr><td>Target</td><td>100%</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Justifikasi dan Rekomendasi</td><td>Berdasarkan tabel diatas, tingkat keberhasilan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pokja berhasil dicapai dengan persentase sebesar 100%.</td></tr>
</table>

5.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

<table>
<tr><td>Objektif Kegiatan</td><td>Terwujudnya Kinerja UKPBJ yang Baik</td></tr>
<tr><td>Indeks Kinerja Utama (IKU)</td><td>Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal</td></tr>
<tr><td>Hasil Penilaian</td><td><table><tr><td></td><td>Persentase Kepuasan</td></tr><tr><td>Target</td><td>93,87 %</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>91.35%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Justifikasi dan Rekomendasi</td><td>UKPBJ telah menyampaikan kuesioner survei kepuasan layanan kepada para pelanggan/stakeholder internal, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan UKPBJ dalam proses pengadaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Kuesioner tersebut terdiri dari 5 pertanyaan dengan skala penilaian kepuasan antara angka 1 hingga 5. Berdasarkan survei yang dilaksanakan selama tahun 2024, diperoleh sebanyak 90 responden. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata nilai kepuasan yang dicapai adalah 3,60 atau setara dengan indeks 90,00 (kategori A – Sangat Baik), yang mencerminkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja pelayanan UKPBJ.</td></tr>
</table>

BAGIAN VI
CAPAIAN LAINNYA

A. Highlight Utama UKPBJ Kementerian Luar Negeri

1. Capaian nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Luar Negeri tahun 2024 sebesar **71.33** dengan predikat **Baik;**
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
3. Kegiatan Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Model Dokumen Pengadaan di Luar Negeri;
4. Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri;
5. Alih Pengetahuan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Website Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri serta Kegiatan *Benchmarking* Studi dalam Rangka Optimalisasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Luar Negeri.

B. Pelaksanaan Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi bagi Pelaku PBJ Kementerian Luar Negeri

1. Terlaksananya bimbingan teknis penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk satuan kerja pusat dan perwakilan dengan capaian nilai penginputan RUP sebesar 100%;
2. Terlaksananya bimbingan teknis Pencatatan Non Tender pada aplikasi SPSE Kementerian Luar Negeri;
3. Terlaksananya *Focus Group Discussion* Rencana Implementasi Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK) pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
4. Kegiatan Perpanjangan Sertifikat Standar ISO 9001 - Quality LPSE serta Training tentang Awareness dan Internal Audit ISO 9001:2015 bagi Personel UKPBJ Kemlu;
5. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola bagi Pegawai Kementerian Luar Negeri; dan
6. Bimbingan Teknis Pencatatan Transaksi PBJ di Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SI PBJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat dan Perwakilan.

PENUTUP

Indeks Kinerja Utama di tahun 2024 salah satu diantaranya ada yang belum terlaksana sesuai target, sehingga upaya evaluasi dan perbaikan sistem akan terus dilaksanakan. Namun untuk keseluruhannya, sesuai Kriteria Pencapaian sudah mendapat Kategori Baik (>80). Untuk kedepannya dibutuhkan sinergi dari seluruh penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa (sekretariat UKPBJ), pelaku pengadaan (KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dll.), pimpinan, serta stakeholder di Lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Laporan Pencapaian Kinerja Tahun 2024 ini akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025, sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.